



KOMUNIKASI POLITIK DI ERA DIGITAL

Emilina Fransiska Hia¹⁾
 Chontina Siahaan²⁾

¹⁾ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia, melinhia03@gmail.com

²⁾ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia

Info Artikel :

Diterima : 8 November 2021

Disetujui : 10 November 2021

Dipublikasikan : 13 November 2021

ABSTRAK
Kata Kunci :

Demokrasi,
 Komunikasi
 Politik, Internet

Selama dua dekade terakhir, Internet telah mempengaruhi aspek kehidupan manusia, termasuk demokrasi. Dalam konteks Indonesia, fenomena baru yang dikenal dengan komunikasi politik online telah muncul sejak munculnya internet pada tahun 1990-an. Ini telah mengubah secara dramatis praktik komunikasi politik tradisional yang telah diturunkan melalui media tradisional. Artikel ini berusaha memberikan diskusi praktis dan teoritis tentang masalah ini. Sebuah studi teoretis tentang bagaimana Internet telah mengubah teori komunikasi politik klasik. Bagaimana sifat baru Internet dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas komunikasi politik dan menimbulkan pertanyaan yang meragukan dalam prosesnya? Apalagi perdebatan ini dengan mudah sampai pada kesimpulan bahwa komunikasi politik tidak boleh lepas dari media baru ini di masa depan. Ini mungkin "laboratorium langsung" yang paling menarik bagi para peneliti tentang peran potensial Internet dalam proses komunikasi politik.

Keywords :

Democracy,
 Political
 Communication,
 Internet

ABSTRACT

Over the past two decades, the Internet has influenced all aspects of human life, including democracy. In the context of Indonesia, a new phenomenon known as online political communication has emerged since the advent of the internet in the 1990s. This has dramatically changed the traditional political communication practices that have been passed down through traditional media. This article seeks to provide a practical and theoretical discussion on this issue. A theoretical study of how the Internet has changed classical political communication theory. How can the new nature of the Internet affect the quality and quantity of political communication and raise questionable questions in the process? Moreover, this debate easily came to the conclusion that political communication should not be separated from this new media in the future. This is perhaps the most interesting "live laboratory" for researchers on the potential role of the Internet in the process of political communication.

1. PENDAHULUAN

Media digital membuka ruang komunikasi dan partisipasi politik dengan meningkatkan kemungkinan interaksi antara elemen penting didalamnya yakni partai dan institusi negara yang disebut sebagai elitedan warga negara atau nonelite. Hal tersebut dilandasi oleh karakter baru Internet yang tidak dimiliki media massa tradisional yakni interaktif, aktif dan kreatif, langsung, menjamin kesetaraan dan berjejaringan (Dijk, 2013). Mendukung pernyataan tersebut, Tsagarousianou (1999) membuat 3 klaim positif tentang peran Internet selama 25 tahun terakhir dalam proses demokrasi yakni membuka ruang pertukaran dan konfirmasi informasi, mendorong debat publik dan formasi deliberasi serta partisipasi warga dalam pengambilan keputusan politik.

Merujuk pada pandangan Tsagarousianou tersebut, komunikasi politik merupakan bagian penting dari proses demokrasi. Dalam konteks diskusi tentang internet dan demokrasi, Dahlberg & Siepera (2007, 7) membawa ide besar tentang demokrasi radikal (radical democracy) yakni demokrasi yang berfokus pada upaya mengkonseptualisasikan proses demokrasi dalam perspektif demokrasi klasik yakni persamaan (equality) dan kebebasan (liberty) yang dimungkinkan bisa difasilitasi Internet. Disini komunikasi politik sebagai salah satu hal krusial dalam proses demokrasi juga mengalami transformasi. Internet sebagai media baru memunculkan konsekuensi praktik diskusi politik yang tidak hanya berlangsung di ruang nyata (real) namun juga komunikasi yang dimediasi ruang maya. Misalnya aktivitas politik yang kini dimediasi internet atau yang disebut politik siber (cyber politic) diantaranya evoting, epetition, email, epolls (Dahlberg & Siepera, 2007, 4) dan eparticipation (Dijk, 2013). Di Internet, demonstrasi dengan mengerahkan massa di jalan telah digantikan oleh kompetisi, pemungutan suara langsung dilakukan dengan ePoll, dan partisipasi warga dalam pembuatan kebijakan dapat dilakukan melalui partisipasi. Komunikasi politik pada awalnya berupa orasi atau orasi untuk calon pemimpin, namun kini tidak hanya terbuka, tetapi juga melalui media sosial seperti Facebook, Twitter dan YouTube. Internet. Cyberspace (Kampanye Cyber).

Internet, yang memfasilitasi proses komunikasi politik, ada di banyak negara di dunia. Salah satu contohnya adalah "Kebangkitan Dunia Arab" 2010 atau peristiwa yang dikenal dengan Arab Spring. Kejadian tersebut menunjukkan bahwa Internet, khususnya media sosial, menggunakan mobilisasi massa untuk menggulingkan rezim otoriter di Bahrain, Tunisia, Mesir dan Turki. Ketenangan pikiran (Kamis, 2013). Selain itu, gerakan Occupy Wall Street 2011 di New York dan gerakan serupa berikutnya di berbagai negara di dunia berhasil dilakukan oleh para aktivis yang memperjuangkan kesetaraan ekonomi dan sosial (Tremayne). (2014). Di Asia, Hong Kong adalah contoh keberhasilan media sosial dalam mempromosikan gerakan kolektif. Sebuah gerakan sosial bernama Umbrella Movement dilakukan oleh 500.000 mahasiswa menuntut demokrasi dari Hongkong hingga Beijing (Druzin & Jessica Li, 2015). Sementara itu, di Amerika Serikat, kemenangan Obama tahun 2007-2008 membuktikan efektivitas Internet dalam memfasilitasi komunikasi politik antara elit dan sektor swasta. Salah satunya adalah kemenangan calon presiden kulit hitam yang tertinggal di Amerika Serikat (Edge, 2010).

Bahkan dalam konteks Indonesia, Internet telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap proses komunikasi politik online sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun

1990-an. Pada awal keberadaannya, Internet menjadi alternatif ekonomi dan politik, di luar kendali pemerintahan Suharto. Namun, seperti yang saya katakan (Lim, 2003, 27485; Hill & Sen, 2005), internet tidak memutuskan untuk mengganggu orde baru, karena hanya 1% penduduk Indonesia yang memiliki akses ke internet saat itu. Namun, Internet memainkan peran penting dalam menyediakan informasi alternatif yang "tidak tersedia" di media tradisional (televisi, radio, surat kabar, majalah) di bawah kendali pemerintahan Suharto saat itu. Misalnya, sebuah artikel berjudul "Suharto Wealth List" oleh Aditjondo, seorang profesor di University of Newcastle, Australia, telah diposting di milis Apakabar pada 1 Februari 1998. Informasi ini dinilai berharga dan menjadi salah satu katalisator gerakan reformasi 1998. Dalam konteks teori komunikasi politik, penting untuk mempertimbangkan fenomena ini, karena saluran, dalam hal ini Internet, merupakan elemen penting dari proses ini dan telah diidentifikasi sebagai pola komunikasi politik tradisional.

Belakangan ini, peran Internet dalam dunia politik Indonesia semakin penting, baik positif maupun negatif. Dalam konteks pembahasan komunikasi politik Indonesia ke depan, jelas terlihat bahwa selalu tumpang tindih dengan teori komunikasi politik online. Ini berdasarkan beberapa diskusi. Pertama, Internet Indonesia terus berkembang baik dari segi jumlah pengguna maupun teknologi. Dimulai dengan 1% dari total populasi pada tahun 1998 (Lim, 2003, 275), penetrasi internet Indonesia telah melampaui 50% dari total populasi Indonesia (APJII, 2016). Banyaknya pengguna internet di Indonesia telah mempengaruhi menjamurnya aktivitas yang dikenal dengan cyberpolitics, penggunaan media online sebagai sarana komunikasi politik. Pemilu federal 2014 adalah contoh nyata penggunaan Internet, khususnya media sosial, dalam proses komunikasi politik.

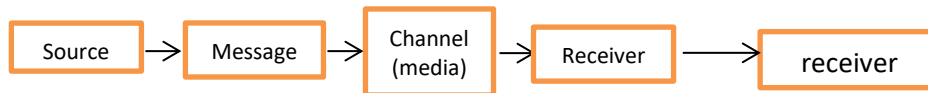
Kedua, melihat rakyat sebagai elemen penting dalam komunikasi politik, menjadikan Internet sebagai masyarakat Indonesia di tengah hilangnya kepercayaan publik terhadap media/media tradisional yang lebih didominasi pasar dan kekuatan politik. Nugroho, 2012; Patria, 2013). Seperti diketahui, era Reformasi Keagamaan tahun berhasil mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Kebebasan Pers, membuka ruang yang besar bagi pendirian media massa bagi masyarakat Indonesia. Setelah reformasi, media massa Indonesia mengalami apa yang disebut euforia karena Suharto membungkam media selama beberapa dekade. Namun, sekitar 10 tahun setelah reformasi, media massa menemukan tantangan baru. Penguasaan media massa/pers tetap, hanya aktor yang mengendalikannya saja yang berbeda. Di era orde baru, negara mendominasi media selama reformasi berdasarkan kepentingan ekonomi dan politik. Dalam sistem media massa ini, media massa/kantor berita tidak memberikan ruang yang cukup bagi warga untuk berekspresi, tetapi justru memberikan ruang bagi elite untuk kekuasaan politik

Dari sini, peran internet, khususnya dalam memberikan ruang alternatif bagi demokrasi, menjadi sangat penting. Artikel ini merinci literatur terbaru tentang teori komunikasi politik di era internet dan literatur yang diharapkan dapat membantu peneliti mempelajari komunikasi politik online.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian diartikan sebagai cara pengamatan untuk mencari jawaban permasalahan atau proses penemuan, baik itu discovery maupun invention. Penelitian merupakan suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Para pakar mengemukakan pendapat dalam merumuskan batasan penelitian atau penyelidikan terhadap suatu masalah, baik sebagai usaha mencari kebenaran melalui pendekatan ilmiah. Metode penelitian ini membahas dua hal secara khusus. Salah satunya adalah bagaimana komunikasi politik klasik berbeda dari komunikasi politik online. Kedua, bagaimana perbedaan pola komunikasi politik yang digunakan oleh dua media yang berbeda menciptakan ruang baru bagi penelitian komunikasi politik di era internet. Untuk membahas definisi klasik komunikasi politik, artikel ini terutama mengacu pada setidaknya tiga ahli, Lasswell (1927), McNair (1995) dan Lelliker (2006). Untuk mengenali sifat baru komunikasi politik online, penulis mengacu pada perspektif yang dikembangkan oleh Holmes (2005), Vedel (2003) dan Habermas (2006). Pandangan tiga ahli tentang komunikasi kebijakan online menguraikan di mana kesenjangan survei dapat digunakan untuk menyelidiki komunikasi kebijakan online.

Penulis mengidentifikasi banyak istilah dan definisi dalam komunikasi politik klasik. Namun pada dasarnya teori-teori tersebut berakar pada pandangan Lasswell (1927), yang dikembangkan dalam disertasinya tentang propaganda. Dia mendefinisikan komunikasi politik dengan pertanyaan dasar tentang siapa mengatakan apa, melalui saluran mana, kepada siapa, dan dalam efek apa, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1 Model Komunikasi Politik Klasik (Lelliker, 2006; 17)

Pandangan Denton dan Woodward (McNair, 1995; 4) dapat lebih menjelaskan teori umum ini. Komunikasi politik secara sederhana didefinisikan sebagai komunikasi dengan tujuan politik berikut:

1. Segala bentuk komunikasi yang dilakukan oleh politisi dan partai politik lainnya untuk tujuan tertentu.
2. Komunikasi yang ditujukan kepada aktor politik oleh aktor non-politik seperti pemilih dan kolumnis.
3. Komunikasi terkait aktor politik dan aktivitasnya ditampilkan di media, dibahas dalam editorial, dan dibahas dalam berbagai format diskusi media.

Model komunikasi politik yang dikemukakan oleh Denton dan Woodward adalah komunikasi politik yang disampaikan melalui media tradisional seperti televisi, radio, surat kabar dan majalah. Komunikasi politik ini bersifat satu arah (one-way communication) dan memiliki pola komunikasi politik yang terpusat dan memposisikan masyarakat umum sebagai penerima pesan yang pasif. Pesan biasanya dikemas oleh media tradisional dalam bentuk pers, editorial, komentar, dan analisis berita dan tersedia untuk umum. Media, di sisi lain, juga memudahkan warga untuk menjangkau elit.

Bahkan, komunikasi politik yang dimediasi oleh media tradisional memungkinkan adanya hambatan berupa praktik kekuasaan yang dilakukan oleh unsur-unsur komunikasi politik. Unsur-unsur komunikasi politik: media, elit, dan masyarakat umum tidak ada dalam kehampaan. Setiap elemen memiliki kontrol yang mempengaruhi dampak pesan pada komunikasi politik. Ini mengontrol sebagian besar sumber daya, terutama kelompok yang mengontrol media (saluran). Sebagai contoh, dalam konteks Indonesia, media dalam proses komunikasi politik seringkali diharapkan menjadi ruang publik yang memberikan ruang bebas bagi publik untuk menyampaikan pendapatnya. Namun kenyataannya, dominasi elit media massa Indonesia belum memenuhi harapan tersebut. Pada akhirnya, media semakin digunakan sebagai alat elit untuk merebut kekuasaan, melemahkan peran media sebagai tempat partisipasi publik. Media tidak lagi menyuruh publik untuk memberikan pendapatnya kepada elit, malah sebaliknya, media menjadi ruang yang didominasi elit untuk memerintah rakyat.

Terkait dengan persoalan proses komunikasi politik yang dimediasi oleh media tradisional, penting untuk mencari saluran alternatif, Internet, yang dapat memungkinkan proses komunikasi politik yang lebih berkualitas. Dalam proses komunikasi, komunikasi politik online termasuk dalam pembahasan computer-mediated communication (CMC). Internet menawarkan karakteristik dan pola komunikasi baru: langsung, terdistribusi, timbal balik, interaktif, dan jaringan.

Internet membuka saluran komunikasi langsung antara publik (warga negara) dan elit, yang semula harus dimediasi oleh pers. Internet yang berfokus pada media sosial dalam artikel ini memiliki karakteristik interaktif karena berbasis Web 2.0 (Tim O'Reilly, 2005). Karakter ini berbeda dengan media tradisional (cetak, elektronik, online), seperti dikemukakan Holmes (2005). Holmes menjelaskan dalam kasus ini perbedaan antara karakter Internet dan televisi yang dapat diwakili oleh media tradisional. Pertama, Internet terdesentralisasi (distributed) dan televisi tersentralisasi (centralized). Karakter ini telah mengubah proses komunikasi politik yang dulunya one-to-many (banyak-ke-banyak), kini berubah menjadi banyak-ke-banyak (many-to-many). Karakter ini melemahkan kekuatan elit, yang semula merupakan persekutuan aktif, dan melepaskan massa yang sekarang aktif. Massa, yang dapat mengumpulkan kekuatan secara kolektif, menggunakan Internet untuk memperjuangkan keuntungan mereka. Warga dapat membentuk jaringan sosial yang memungkinkan koordinasi untuk debat politik, ruang terbuka, membangun ruang publik interaktif, dan memobilisasi dan mengoordinasikan aksi kolektif. Kedua, Internet membuka komunikasi dua arah (two-way communication), sedangkan televisi hanya memiliki komunikasi satu arah (one-way communication). Media sosial, misalnya, merupakan ruang di mana para aktor demokrasi dapat berkomunikasi secara langsung dalam dua arah, yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan di televisi. Orang masih bisa berbicara langsung dengan presiden melalui akun media sosial. Ketiga, Internet dapat lepas dari kendali kekuatan tertentu, sedangkan televisi mudah dikendalikan. Casstell (2009) menyatakan bahwa orang-orang di Internet adalah masyarakat jaringan yang membangun internetwork tanpa batas yang tidak bisa begitu saja disensor. Jaringan meliputi jaringan informasi, jaringan sipil, dan jaringan perusahaan. Sementara itu, televisi telah menjadi media elektronik yang dapat dengan mudah dikuasai oleh segelintir orang, seperti dalam kasus Indonesia, konglomerat pemilik media tersebut.

Vedel (2003) lebih lanjut menjelaskan bagaimana teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dalam hal ini Internet, mempengaruhi komunikasi politik. Dalam arti tertentu, ia berbagi pertanyaan dengan Homles (2005) tentang manfaat Internet, tetapi juga berspekulasi tentang isu-isu terkait. Hal tersebut menunjukkan bahwa pandangan Vedel tentang karakteristik Internet mirip dengan Holmes (2005), seperti langsung, interaktif, dan terdesentralisasi. Namun, Vedel menawarkan perspektif baru sebagai karakter global yang murah, publik, dipilih dengan cermat. Pada bagian ini, penulis secara individual menjelaskan karakteristik media baru dalam memfasilitasi proses komunikasi politik, dan membahas berbagai penelitian yang membahas potensi dan kelemahan Internet dalam memfasilitasi komunikasi politik. Perspektif Vedel dapat menjadi titik awal bagi peneliti untuk mempertimbangkan proses komunikasi politik dari berbagai perspektif.

Pertama, Internet memungkinkan aktor demokrasi untuk mengurangi biaya pembuatan kampanye politik. Misalnya, politisi dapat menjangkau masyarakat umum melintasi batas negara hanya dengan membuat akun media sosial dan situs web. Menurut Wedel, pola ini secara dramatis dapat mengubah proses komunikasi politik, yang dulu harus dikomunikasikan melalui pers. Namun menurutnya, sifat internet dapat menimbulkan berbagai masalah, termasuk membanjirnya informasi yang membatalkan pesan kepada khalayak. Publik tidak fokus pada isu-isu penting, tetapi memperhatikan debat politik yang kurang penting. Masalah lainnya adalah algoritma media sosial yang mengarahkan pemirsa hanya ke topik yang mereka sukai.

Salah satu studi tentang masalah ini dilakukan oleh, misalnya, Grömping (2014). Ia meneliti proses komunikasi politik yang dimediasi oleh Facebook dengan meneliti bagaimana kelompok-kelompok partisan berkomunikasi dalam pemilihan umum Thailand 2014. Dia menggunakan berbagai metode penelitian, termasuk analisis isi pesan yang diposting di Facebook, analisis jaringan, dan visualisasi interaksi antara kelompok Partisan di halaman Facebook. Hasil penelitian menunjukkan bahwa situs jejaring sosial (SNS) kurang berhati-hati dalam debat politik online karena pesan yang tidak fokus. Media sosial, di sisi lain, mendorong berkembangnya kantong-kantong pemikiran kelompok eksklusif yang terpisah dari kelompok lain, atau yang kemudian disebut Enclave Group. Wacana politik yang dibuat di kantong-kantong ini ditandai dengan munculnya informasi yang tidak konsisten dan menyesatkan. Media sosial adalah "ruang gema" yang tidak memungkinkan terjadinya pertukaran ide atau refleksi kritis, karena penelitian ini tidak mencari informasi yang bertentangan dengan diri sendiri, tetapi untuk informasi yang mendukung pendapat seseorang. Saya menyimpulkan demikian. Ruang gema dapat muncul di media sosial atau saat melihat berita di media online. Media sosial ini mengimplementasikan algoritma pemilihan konten pada homepage Facebook sehingga postingan pertama yang muncul di news feed disesuaikan dengan minat pengguna, sehingga Facebook menarik pengguna ke dalam ruang gema. Minat didasarkan pada riwayat klik, suka, bagikan, dan komentar pengguna di halaman beranda Facebook. Menggunakan algoritme seperti itu, misalnya, memastikan bahwa pengguna Facebook menerima informasi tentang topik tertentu hanya dari satu perspektif. Pada akhirnya, pengguna Facebook yang meninggalkan jejak digital berupa konsumsi informasi yang ditujukan kepada kandidat tertentu dalam posisi kepemimpinan, misalnya dalam konteks komunikasi politik, cenderung menerima informasi negatif tentang kandidat tersebut, begitu pula sebaliknya. Demikian pula, ketika pengguna Internet menggunakan media online, algoritme menautkan ke apa yang

mereka cari, daripada memberikan informasi dari perspektif yang berbeda. Sifat algoritma yang berusaha memberikan informasi yang komprehensif tentang suatu kasus memiliki kelemahan dalam memberikan informasi dari satu perspektif, sehingga menghambat diskusi penting.

Dalam konteks komunikasi politik online Indonesia, belum ada penelitian yang secara khusus menggunakan konsep echo chambers untuk mengkaji permasalahan komunikasi politik online Indonesia. Namun, dalam studi terbarunya yang berfokus pada hubungan antara media sosial dan politik, Lim (2017) memberikan ide tentang masalah ruang gema media sosial. Ia menegaskan, di balik semangat kebebasan berekspresi yang melandasi partisipasi politik online, media sosial juga digunakan sebagai sarana untuk membenci dan membungkam 4.444 orang lainnya. Mengenai ruang gema yang dikemukakan oleh Grömping (2014), Lim lebih suka menggunakan istilah "algoritma excelave". Hal ini, menurutnya, menciptakan bentuk nasionalisme kesukuan. Lim menekankan bahwa pengguna media sosial di wilayah tersebut akan bersikeras dan membenarkan versi nasionalisme mereka dengan mengabaikan kesetaraan dan keadilan kelompok lain.

Penulis memiliki beberapa permasalahan dengan konsep ruang gema, terutama permasalahan komunikasi online politik di Indonesia saat ini, seperti penyebaran berita palsu (hoax) dan berita palsu (fake news). dia. Salah satunya disediakan oleh karakteristik algoritma Internet. Penelitian dapat fokus pada upaya untuk menjelaskan bagaimana pola yang digunakan oleh pengguna internet digunakan untuk mengkonsumsi hoax dan berita palsu. Sementara itu, penelitian ini juga dapat fokus pada diskusi teoritis untuk mengkonfirmasi berbagai teori tentang khalayak Internet aktif yang telah digunakan sebagai dasar teoritis untuk penelitian khalayak Internet. Sebagai contoh, Uses and Gratification Theory (1944) Herta Herzog digunakan untuk membenarkan sifat khalayak Internet yang dianggap aktif. Konsep ruang gema dengan jelas memposisikan pengguna Internet, termasuk media sosial, sebagai audiens yang tampaknya secara aktif memilih informasi yang mereka butuhkan, tetapi pada dasarnya berada di bawah kekuatan teknologi algoritmik.

Kedua, sebagaimana telah disebutkan, sifat langsung antara persekutuan dan persekutuan membuka kemungkinan-kemungkinan baru untuk komunikasi. Kalaupun ada calon presiden, presiden, menteri, dan anggota dewan yang memiliki akun media sosial di Internet, masyarakat dapat dengan mudah berkomunikasi secara langsung. Tim kampanye politik dapat dengan mudah memasuki ruang privat 4.444 pemilih (pemilih) dan menyampaikan pesan secara langsung. Namun, menurut Vadel, angka ini bisa membuka ruang publisitas kepada masyarakat luas melalui partai politik. Propaganda dapat dengan mudah terjadi di Internet karena tidak ada pembawa pesan yang biasanya dimainkan oleh media arus utama sebagai gatekeeper atau aktor yang berperan dalam pemilihan informasi untuk memastikan fakta dan kebenaran informasi. Masyarakat umum dapat dengan mudah memperoleh informasi operasi di Internet. Salah satu contohnya adalah berita bohong dan hoaks yang belakangan ini mewarnai proses komunikasi politik Indonesia.

Terkait propaganda online, Hasfi (2017a) meneliti peran media sosial dalam Pilpres 2014 dan mengidentifikasi berbagai pola hoaks dan berita palsu yang digunakan untuk memobilisasi massa politik. Persoalannya, hoax dan berita palsu tidak hanya memuat

informasi yang tidak benar atau salah, tetapi juga pertanyaan-pertanyaan primitif yang membahayakan prinsip-prinsip pluralisme dalam masyarakat Indonesia. Wacana primitivis terutama dilakukan dalam mekanisme propaganda dan kampanye hitam yang didistribusikan melalui Twitter dan dapat diakses oleh semua pemegang akun. Hasfi (2017b) juga menyatakan bahwa proses komunikasi politik di media sosial bersifat ideologis dan memasukkan praktik kekuasaan seperti kebijakan etnis dan agama yang membahayakan kehidupan demokrasi. Hal ini dikarenakan demokrasi mengupayakan nilai-nilai universal yang diterima oleh semua golongan, namun baik politik etnis maupun agama menyimpang dari nilai-nilai tertentu yang berasal dari golongan tertentu. Dari sudut pandang Vedel, penelitian Hasfi didasarkan pada isu karakter media sosial yang tidak dimediasi secara langsung.

Selain hasil di atas, peneliti mencatat bahwa penggunaan internet dalam aktivitas politik Indonesia belakangan ini menyimpang dari pandangan pesimistis terhadap internet (Lim, 2017). Hal ini memposisikan disertasi tentang komunikasi langsung sebagai dominasi komunikasi politik online yang hanya mitos. Dari hal tersebut peneliti menyadari perlunya peneliti komunikasi media online untuk berupaya melihat fenomena mikro yang terjadi di dunia maya, yang menunjukkan potensi internet untuk menjembatani komunikasi online. Misalnya, kami fokus menganalisis interaksi dengan akun media sosial elit dan pengikut mereka, dalam hal ini sektor swasta.

Ketiga, media sosial memiliki karakter penerima terpilih yang memungkinkan aktor demokrasi dalam proses komunikasi politik berkomunikasi dengan kelompok kepentingannya. Elit politik dapat, misalnya, membangun ruang diskusi pribadi yang hanya berisi kelompok sasaran tertentu. Oleh karena itu, elit diharapkan lebih efektif dalam menyampaikan pesan-pesan tertentu kepada kelompok. Sementara itu, masyarakat umum juga berkesempatan membentuk forum diskusi kelompok untuk membahas topik-topik yang diminati guna melakukan gerakan politik (social movement), mengambil keputusan (decisions) dan membentuk opini publik (public opinion). ..). Berawal dari konsep ketiga ini, sebagian besar penelitian yang dilakukan lebih banyak terkait dengan peran aktif Internet dalam proses komunikasi politik. Misalnya, oleh Postmes (2002), yang melihat bagaimana Internet (Web) berubah. Dari perilaku persuasif ke perilaku konfrontatif, dan dari individu ke kelompok. Menurut survei yang menggunakan metode survei ini, para aktivis dan non-aktivis menganggap perilaku online sebagai perilaku alternatif yang setara dengan perilaku nyata (offline).

Dalam konteks Indonesia, penelitian ekstensif tentang gerakan sosial online sedang dilakukan di Indonesia. Lim telah menjadi salah satu peneliti terlengkap yang mempelajari fenomena ini sejak munculnya Internet di Indonesia. Lim (2005) mengkaji peran Internet dalam aktivitas politik pada masa transisi dari orde baru ke reformasi. Lim memahami bagaimana Internet terkait dengan perebutan kekuasaan, dan identitas itu adalah bagian penting dari proses tersebut. Lim menyelidiki dua masalah utama. Yaitu,;

1. bagaimana Internet menjadi alat untuk mempromosikan reformasi 98, melakukan diskusi politik, dan menyebarkan informasi
2. oleh Laskar Jihad (Tentara Jihad) yang beroperasi dalam konflik Marc Penggunaan internet.

Internet telah digunakan sebagai alat untuk menghidupkan kembali masalah promordiaisme, identitas ras dan komunitas yang memicu kekerasan massal. Selain itu, Lim (2013a) mengidentifikasi bagaimana gerakan media sosial ini memfasilitasi aktivitas politik. Menurutnya, gerakan media sosial akan berhasil memobilisasi massa ketika punya cerita sederhana. Resiko rendah; konsisten dengan metanarasi seperti nasionalisme dan agama. Di sisi lain, jika cerita yang dibangun bertentangan dengan kepentingan cerita media arus utama, gerakan media sosial akan gagal. Menurut penulisnya, Vedels, penelitian tentang fitur ketiga Internet telah membahas potensi Internet dalam proses komunikasi politik dan, sebaliknya, masalah Internet, bagaimana sebenarnya ia mengganggu Internet. dia lebih fokus. Kualitas komunikasi politik. Penulis percaya bahwa masalah privasi dalam komunikasi politik online belum banyak dibahas oleh para peneliti dan dapat mewakili celah penelitian.

Masalah privasi ini tidak dibahas, antara lain karena rendahnya tingkat literasi digital di Indonesia, dan privasi internet tidak dianggap sebagai masalah serius. Di negara-negara Barat, masalah privasi media online (juga dari perspektif komunikasi politik) adalah masalah serius. Pelanggaran privasi yang disebutkan dalam komunikasi politik online adalah kegiatan yang memantau jejak digital calon pemilih di Internet dan menggunakannya untuk menentukan strategi kampanye. Ayn Rand (1943) menyebut tindakan semacam itu sebagai pelanggaran etika ruang privat, berdasarkan pemahaman bahwa peradaban adalah masyarakat dengan hak dan ruang pribadi. Masalah privasi belum dianggap sebagai masalah privasi. Singkatnya, isu ini jarang menarik perhatian peneliti komunikasi kebijakan online Indonesia. Dalam hal ini, relevansi sosial dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan literasi internet khususnya untuk memahami secara kritis pentingnya menjaga privasi di internet agar terbebas dari penyalahgunaan privasi. Dan tujuan politik.

Keempat, menurut Vedel, fitur yang secara dramatis mengubah pola komunikasi politik adalah kemampuan Internet untuk memperbarui berita dengan cepat dan sering untuk menjangkau khalayak sasarannya. Di media sosial, pesan yang tersebar luas dan bergerak cepat, atau pesan yang biasa disebut viral, adalah pesan yang menarik perhatian publik. Vedel menjelaskan bahwa TIK dapat memfasilitasi proses komunikasi politik dari elit ke masyarakat umum, karena Internet memfasilitasi koneksi dengan masyarakat umum dan memungkinkan aktor politik untuk mengembangkan strategi komunikasi politik. TIK dapat mengurangi biaya produksi dan menyebarkan informasi. Wedel menekankan bahwa politisi akan mengembangkan teknologi manajemen media seperti siaran pers dan membuka akses jurnalis melalui saluran internet untuk memaksimalkan jangkauan untuk menarik perhatian media arus utama.

Namun, karakter ini menyebabkan masalah yang disebut pengambilan keputusan tombol tekan Vedel. Pengambilan keputusan hanya didasarkan pada pertimbangan yang dangkal. Artinya, cukup tekan tombol pada keyboard komputer Anda tanpa melalui proses musyawarah, seperti yang Anda harapkan dari proses komunikasi politik yang berkualitas. Berbagai penelitian telah dilakukan mengenai dampak karakter Internet pada proses komunikasi politik, seperti slacktivism, lazy activism, clickism (aktivis klik), aktivisme kursi, dan aktivisme keyboard. .. Perbedaan istilah tersebut merujuk pada aktivitas di dunia maya yang tidak menghasilkan gerakan nyata di ranah offline, melainkan hanya pergerakan yang berhenti di dunia maya.

Studi terbaru tentang kemungkinan keempat gejala Internet menyediakan ruang tanpa batas waktu cenderung pesimis. Hal ini dimungkinkan karena andalan karakter media baru ini menyebabkan masalah dengan penyebaran Internet. Makalah tentang efektivitas komunikasi yang muncul dari kecepatan informasi bahkan kontroversial, sebagai dasar pembahasan dalam bentuk kualitas komunikasi yang dianggap lebih penting. Namun, peneliti menemukan bahwa masih banyak pertanyaan tentang karakter ini yang dapat dikembangkan sebagai topik diskusi tentang optimisme tentang Internet. Misalnya, Internet telah memudahkan para penjaga pemilu untuk berpartisipasi dalam politik pada tahun 2014 melalui Internet dan media sosial. Langkah ini mendigitalkan formulir C1 dari situs KPU untuk penghitungan suara yang sebenarnya. Internet juga akan menghubungkan 700.000 relawan dari seluruh negara bagian Indonesia untuk memastikan bahwa hasil pemungutan suara tidak curang. Pertanyaan terbuka tentang potensi internet diharapkan dapat terus menarik perhatian peneliti untuk memperkaya perdebatan tentang potensi internet dalam komunikasi politik online ini.

Kelima, fitur interaktivitas adalah keunggulan utama Internet dibandingkan media tradisional. Interaktivitas ini memungkinkan komunikasi bottom-up atau bottom-up, berbeda dengan komunikasi politik melalui media tradisional dengan pola top-down atau top-down. Interaksi langsung menjadi penting karena masyarakat tidak lagi harus bergantung pada media mahal untuk berkomunikasi dengan calon presiden dan lainnya. Berbagai kajian terkait kajian ini biasanya berfokus pada bagaimana kualitas komunikasi politik dengan ruang interaksi di dunia maya ini terjalin. Misalnya, survei oleh Zheng (2005) memiliki dua pertanyaan utama. Benarkah internet berfungsi sebagai sarana interaksi antara negara dan masyarakat? Dapatkah Internet memfasilitasi transisi demokrasi dari sistem politik otoriter? Studi ini menjawab dua pertanyaan tersebut dalam studi empiris yang dilakukan di Cina. Dia meneliti dampak demokrasi Internet dalam konteks interaksi negara-sosial, menggunakan tiga tingkat analisis: Internet sebagai sarana komunikasi, Internet sebagai ruang publik, dan Internet sebagai alat untuk tindakan kolektif. .. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Cina, dampak Internet pada proses transformasi demokrasi tergantung pada strategi interaksi antara negara dan masyarakat di semua tingkat analisis.

Karlsem (2015) melakukan survei lain yang berfokus pada peran opinion leader dalam arus komunikasi di media sosial. Karlsem menyelidiki seberapa aktif pemimpin opini sampai batas tertentu sebagai pengikut partai politik dan akun media sosial politisi, dan seberapa aktif interaksi mereka, baik online maupun offline. Dia mensurvei 5.700 responden dan menemukan bahwa sebagian besar akun partai dan pengikut politisi Facebook adalah pemimpin opini yang beroperasi di jaringan online dan offline. Temuan ini memperkuat kaitan kunci antara jejaring sosial dan peran para pemimpin opini dalam arus komunikasi politik di masyarakat.

Dalam konteks pengguna Internet Indonesia, penelitian tentang interaktivitas Internet selama lima tahun terakhir cenderung menimbulkan pesimisme (Lim, 2017; Lim, 2013a; Hasfi, 2017a). Potensi Internet sebagai bangsa, anti nasional terhadap hegemoni media mainstream (Priyadharma, 2017). Nuansa pesimis tentang peran Internet dalam komunikasi politik online dimungkinkan karena fokus kajian Internet tetap pada peran Internet dalam dunia politik yang bersifat kompetitif. Untuk itu, perlu memperluas kajian komunikasi politik online untuk menggali potensi interaktivitas Internet bersama dengan isu-isu politik seperti kesehatan, lingkungan, seni dan pendidikan.

Keenam, yang disebut sifat desentralisasi memungkinkan Internet untuk menciptakan sistem komunikasi baru di luar komunikasi arus utama. Di sisi lain, masalah ini juga menimbulkan masalah seperti terciptanya ruang publik yang terfragmentasi dan regulasi yang ketat. Pandangan Vedel tentang ruang publik yang terfragmentasi menarik karena sejalan dengan Habermas, salah satu pendiri konsep ruang publik. Pernyataan ini disampaikan Habermas pada Seminar Internasional International Communication Association (ICA) di Jerman pada tahun 2006. Seminar itu dikritik keras oleh Habermas yang optimistis dengan Internet.

Berikut pernyataan Habermas :

"The Internet has certainly reactivated the grassroots of an egalitarian public of writers and readers. However, computer-mediated communication in the web can claim unequivocal democratic merits only for a special context: It can undermine the censorship of authoritarian regimes that try to control and repress public opinion. In the context of liberal regimes, the rise of millions of fragmented chat rooms across the world tend instead to lead to the fragmentation of large but politically focused mass audiences into a huge number of isolated issue publics. Within established national public spheres, the onlinedebates of web users only promote political communication, when news groups crystallize around the focal points of the quality press, for example, national newspapers and political magazines. (Habermas, 2006, p. 423)"

Habermas percaya bahwa Internet hanya dapat memfasilitasi proses demokrasi dalam keadaan tertentu, seperti menggulingkan rezim otoriter yang menindas rakyat. Namun dia percaya bahwa peran Internet dalam demokrasi di ruang liberal menghadapi tantangan yang muncul dari munculnya jutaan ruang obrolan yang terfragmentasi. Menurutnya, ruang-ruang tersebut cenderung menciptakan fragmentasi yang secara politis mengisolasi pengguna internet dari isu publik yang tak terbatas. Ia juga menegaskan bahwa komunikasi politik di Internet dimungkinkan jika itu adalah surat kabar yang berkualitas, seperti surat kabar nasional, majalah politik, atau Internet. Alasan utamanya, menurutnya, adalah tidak adanya gatekeeper di media baru, yang berperan penting dalam memandu proses debat deliberatif seperti media tradisional.

Perdebatan tentang pesimisme dan optimisme internet tentang penyediaan ruang publik sebagai tempat komunikasi politik masih terus berlangsung. Bahkan banyak Habermas yang tidak menyukai pesimisme Habermas karena mereka percaya bahwa Internet telah memberikan ruang lebih kepada publik untuk mengekspresikan diri. Diskusi antara Habermas dan Habermas bisa menjadi titik awal bagi para peneliti komunikasi politik online untuk merefleksikan peran Internet dalam proses komunikasi politik.

3. KESIMPULAN

Diskusi teoritis komunikasi politik klasik dan komunikasi politik online menunjukkan bahwa komunikasi politik di era Internet mengalami dinamika perubahan yang menarik yang diteliti lebih lanjut oleh peneliti komunikasi politik saat ini dan masa depan. Ada beberapa hal yang dianggap penting dalam pembahasan. Pertama, sifat media baru, dalam hal ini Internet, menentukan perubahan pola komunikasi yang lebih langsung, lebih murah, lebih cepat, lebih interaktif, dan lebih politis. Komunikasi politik yang terdesentralisasi pada awalnya sepihak dalam dua arah, terurai, top-down ke bottom-up,

elitis ke non-elitis. Kedua, sifat baru Internet akan membawa perubahan positif dalam proses komunikasi politik dan menyediakan media alternative bagi public untuk mengekspresikan opini publik secara lebih terbuka dan bebas. Namun pada kenyataannya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa komunikasi politik online juga menimbulkan hambatan baru yang tidak dapat ditemukan dalam proses komunikasi politik tradisional. Ketiga, kemungkinan dan permasalahan komunikasi politik online telah melahirkan berbagai pandangan optimis dan pesimistis terhadap internet, serta pemikiran dan solusi teoretis baru bagi para peneliti komunikasi politik, khususnya berbagai permasalahan politik. . Komunikasi di era internet.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sudibyo & Nezar Patria. The Television Industry in Post-authoritarian Indonesia, *Journal of Contemporary Asia*, 43:2, 257-275, 2013. DOI: 10.1080/00472336.2012.757434
- APJII & Puskakom UI. Profil Pengguna Internet Indonesia. Jakarta: Puskakom UI&APJII, 2016. Castells, Manuel. (2009). *Communication Power*. New York: Oxford University
- Press.Dijk, Jan A.G.M. *Digital Democracy: Vision and Reality* dalam I. Snellen & W. van de Donk 'Public Administration in the Information Age: Revisited', IOS-Press, 2013.
- Dahlberg & Siapera. *Radical Democracy and the Internet Interrogating Theory and Practice*. New York: Palgrave Macmillan, 2007.
- Druzin & Jessica Li. The Power of The Key Stroke: Is Social Media the Radical Democratizing Force We Have Been Led to Believe It Is? *Harvard Human Right Journal*, February (2015).
- Edge, Thomas. Conservatives, White Voters, and the Election of Barack Obama. *Journal of Black Studies*. Volume 40 Number 3 January 2010 426-444
- Grömping, Max. (2014). Echo Chambers' Partisan Facebook Groups during the 2014 Thai Election. *Asia Pacific Media Educator*. SAGE Publications Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC DOI: 10.1177/1326365X14539185 <http://ame.sagepub.com>
- Hasfi, Nurul. Primordialism through Hoax and Fake News during the 2014 Presidential Election of Indonesia. Presented at ICISPE International Conference. 2017a
- Hasfi, Nurul. Politik Keshalehan Personal dalam Pemilihan Presiden 2014 dalam Media Sosial Twitter *Jurnal Pemikiran Sosiologi* Volume 4 No.2 Agustus, 2017b.
- Habermas, J. Political Communication in Media Society: Does Democracy Still Enjoy *angnovis* 10.1 – Fall 2009 Epistemic Dimension? The Impact of Normative Theory on Empirical Research. *Communication Theory*, 16(4), 411-426. 2006. doi: 10.1111/j.1468-2885.2006.00280.x.
- Hill, David T & Krisna Sen.(2005). *The Internet in Indonesia's new democracy*. Oxon, England: RoutledgeCurzon
- Holmes, David. *Communication Theory: Media, Technology and Society*. London: Sage Publication, 2005

- Karlsen, Rune. Followers are opinion leaders: The role of people in the flow of political communication on and beyond social networking Sites. *European Journal of Communication* 1 –18.2015. DOI: 10.1177/0267323115577305
- Khamis, Sahar. “Cyberactivism” in the Arab Spring: What Social Media Can and Can Not Do. *International Affairs Forum*. Vol 4, Issue 1, (2013).
- Laswell, H.H. *Propaganda Techniques in the World War*. New York: Knopf, 1927.
- Lilleker, Darren G. *Key Concepts in Political Communication*. Sage Publication: London, Thousand Oak, New Delhi, 2016.
- Lim, Merlyna. *The Internet, Social Network and Reform in Indonesia*. Di N. Couldry and J. Curran. *Contesting Media Power: Alternative Media in A Networked World*. Rowan & Littlefield. 2013
- Lim, Merlyna. *@crossroads: Democratization & Corporatization of Media in Indonesia*. USA: Participatory Media Lab & Ford Foundation, 2011
- McNair, Brian. *An Introduction to Political Communication*. London & New York: Routledge, 1995.
- Nugroho, Yanuar, dkk. *Mapping The Lanscape of The Media Industry in Contemporary Indonesia*. Jakarta: Centre for Innovation Policy and Governance, 2012.
- O’Reilly T. (2005). *What is Web 2.0 : Design patterns and business models for the next generation of software*. Available at:
<http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web20.html>
- Tsagarousianou, R. *Electronic democracy: Rhetoric and reality*. *Communications: The European Journal of Communication Research*, 24 (2). (1999). pp. 189–208.
- Vedel, Thierry. *Political Communication in New Era: Political Communication in The Edge of Internet (Chapter 3)*. London & New York: Routledge, 2003.
- Zheng, Yongnian & Guoguang wu. *Information Technology, Public Space, and Collective Action in China*. *Comparative Political Studies*, vol. 38 no. 5, june 2005 507-536